

Daftar Pustaka

a. Buku

- A.A. Oka Mahendra, S. (2000). *Penelitian Tentang Aspek Hukum Pelaksanaan Inisiatif DPR Dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.
- Ni'matul Huda S.H., M. (2009). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media
- Malicia, E., & Indah, S. (2021). *Hukum Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Suluh Media.
- M. Aries, D. (2023). *Buku Putih Pemerintahan Indonesia*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.

b. Jurnal

- Achmad Aries, R. (2019). *Pemilihan Lansia Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 (Studi Analisis Pelaksanaan Pilkada Bagi Pemilih Lansia)*. <http://ppsp.nawasis.info/>
- Albert Morangki. (2012). *TINJAUAN TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN DI BIDANG PERTANAHAN*. XX, 61–78.
http://repo.unsrat.ac.id/276/1/TINJAUAN_TERHADAP_KEWENANGAN_PEMERINTAH_DAERAH.pdf
- Aldin Wira, Y. (2021). *Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembuangan Kotoran Sapi di Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan)*.
- CH. Merry, I. (2013). *OPTIMALISASI PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN MAGELANG DALAM MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)*.
- Chyntia Dewi, A. S. (2013). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK JALANAN DI KOTA YOGYAKARTA*.
- Hariyanto. (2020). Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 3(2), 99–115. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4184>

- Hermawan, W. (2020). *ANALISIS DAMPAK SOSIAL EKONOMI TERHADAP PERMINTAAN ROKOK DI PROVINSI BANTEN*. 10(2).
<http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/Ekonomi-Qu>
- M Agung, M. (2014). *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor yang Dilakukan Oleh Anak*.
- Merli, H. (2021). *SUMBER KEWENANGAN BADAN ATAU PEJABAT TATA USAHA NEGARA*. 1–2.
- Muhammad Habib, M. (2022). *KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PELALAWAN GUNA MEMBERDAYAKAN EKONOMI DAERAH*. Dalam *Skripsi*.
- Muhammad Junyedi, S. (2019). *Kewenangan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gallery 3 Apartement Tanpa Rekomendasi Gubernur Dihubungkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat*.
- Priokta, D. (2014). *KEDUDUKAN DAN WEWENANG WAKIL KEPALA DAERAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH*.
- Sherlock Halmes, L. (2020). *Konstruksi Penataan Daerah dan Model Pembagian Urusan Pemerintahan*. *SASI*, 26(4), 557. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.414>
- Sunarti. (2022). *Metode dan pendekatan analisa dalam ilmu pemerintahan Analisa pendekatan kebijakan pemerintah daerah*.
- Suparto. (2018). *Otonomi Daerah Di Indonesia ; Pengertian, Konsep, Tujuan, Prinsip dan Urgensinya*. 6–7.
- Syendu Surya, A. (2015). *Pelaksanaan Memorandum of Understanding Antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Dan Kejaksaan Tinggi Terhadap Pengawasan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung*.

c. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok

d. Internet

<https://www.radarbanten.co.id/sidak-kawasan-tanpa-rokok-lima-pejabat-ketahuan-merokok-di-ruang-kantor/> (diakses pada tanggal 18 Mei 2023)

<https://gaya.tempo.co/read/678852/survei-30-persen-perokok-aktif-kota-serang-adalah-pelajar> (diakses pada tanggal 18 Mei 2023)

<https://faktabanten.co.id/serang/kawasan-tanpa-rokok-di-kota-serang-mulai-berlaku-tapi-iklan-rokok-menjamur/> (diakses pada tanggal 18 Mei 2023)

<https://dinkes.bantenprov.go.id/read/berita/1966/Perokok-Anak-Masih-Banyak-Revisi-PP-Tembakau-Diperlukan.html> (diakses pada tanggal 18 Mei 2023)

<https://goodstats.id/article/dimana-provinsi-dengan-perokok-di-terbanyak-di-indonesia-wrKuz> (diakses pada tanggal 18 Mei 2023)

<https://bkpsdm.tanjabarkab.go.id/2017/07/11/kedudukan-tugas-dan-fungsi-bkpsdm/> (diakses pada tanggal 27 Oktober 2023)

<https://dpkp.situbondokab.go.id/halaman/tugas-pokok-dan-fungsi> (diakses pada tanggal 28 Oktober 2023)

<https://dkp.bogorkab.go.id/layanan-pengadaan-secara-elektronik-lpse/#:~:text=LPSE%20adalah%20unit%20kerja%20yang,pengadaan%20barang%20jasa%20secara%20elektronik>. (diakses pada tanggal 1 November 2023)